

LEBIH RENTAN TERTULAR VIRUS

PKL Berusia Lanjut Diimbau Rehat Berjualan

YOGYA (KR) - Para pedagang kaki lima (PKL) yang berusia lanjut diimbau rehat atau tidak memaksakan diri berjualan. Terutama di kawasan wisata seperti Malioboro yang kerap bersinggungan dengan masyarakat banyak. Hal ini karena usia lanjut lebih rentan tertular virus akibat tingkat kerawanan yang tinggi.

Kepala UPT Malioboro Ekawanto, mengaku tengah melakukan sosialisasi terkait imbauan tersebut. "Imbauan sudah kami berikan melalui komunitas di sana. Jadi yang sudah lansia tetap di rumah saja. Untuk aktivitas jualannya serahkan ke anaknya atau saudaranya yang berusia muda," jelasnya, Senin (5/10).

Sebelumnya, banyak PKL berusia lansia yang turut berjualan di Malioboro saat pandemi Covid-19. Akan tetapi, ketika ada satu PKL yang meninggal dunia dan terkonfirmasi positif, secara perlahan PKL yang lansia semakin berkurang dan digantikan oleh

kerabatnya. Saat ini, dari sekitar 2.500 PKL di Malioboro, mereka yang lansia hanya 10 persennya.

"Jumlah lansia yang masih berjualan di Malioboro sudah tidak seperti dulu. Rata-rata mereka ialah para senior yang mungkin belum ada anggota keluarganya yang bisa menggantikan berjualan setiap hari," imbuh Ekawanto.

Selain PKL, warga berusia lanjut yang setiap hari beraktivitas di Malioboro ialah pengayuh becak dan andong. Kedua profesi itu memang membutuhkan keahlian khusus dan tidak sembarang anggota keluarganya bisa menggantikan.

Akan tetapi, baik becak maupun andong diharuskan memenuhi standar protokol seperti ada sekat antara penumpang dengan pengemudi.

Di samping itu, penerapan protokol di kawasan Malioboro juga sudah berjalan bagus. Mulai dari pemindaian 'QR Code' di setiap zona, jalur pengunjung hingga penggunaan masker. Apalagi petugas gabungan setiap hari turut melakukan razia masker kepada pengunjung di Malioboro.

Sementara Ketua Paguyuban PKL Malioboro Tri Dharma Paul Zulkarnain, memastikan pihaknya terus mengimbau kepada para anggota yang berusia lansia untuk tidak berdagang di Malioboro. "Sudah ada kesadaran secara mandiri. Biasanya mereka yang lansia itu datang untuk sekadar mengecek keuntungan yang didapat. Selebihnya rehat di rumah dan penjualannya digantikan anak atau saudaranya," akunya. (Dhi)-d



Wakil Walikota Yogya bersama jajarannya memantau aktivitas PKL Malioboro yang mulai bergeliat sejak Juni 2020 silam. (KR-Ardhi Wahdan)

Kualitas Bank Sampah Harus Meningkatkan

YOGYA (KR) - Dari sisi kualitas, peran bank sampah diharapkan bisa terus meningkat. Terutama sebagai sentra edukasi masyarakat dalam mengelola sampah. Hingga saat ini tercatat ada sekitar 420 bank sampah yang berbasis wilayah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogya Sugeng Darmanto, menyebut selama ini banyak bank sampah yang sebatas mengumpulkan sampah yang bernilai ekonomis.

"Masih banyak yang bisa dilakukan selain pengumpulan barang bekas yang memiliki nilai jual. Upaya peningkatan kualitas ini yang akan kami garap sampai akhir tahun," jelasnya, Senin (5/10).

Salah satunya yang dapat dilakukan ialah kejelian para pengurus bank sampah dalam memutakhirkan daftar harga barang-barang bekas yang selama ini rutin disetorkan ke bank sampah.

Daftar harga yang selalu diupdate itu pun lantas ditempelkan di media informasi warga atau sekitar bank sampah. Dengan begitu, masyarakat setempat khususnya nasabah bank sampah bisa memantaunya se-

cara rutin.

"Misalnya bank sampah itu menerima barang apa saja. Kemudian dituliskan tabelnya seperti kertas, plastik, botol kaca dan lainnya berikut harga terkini. Itu akan memberikan motivasi tersendiri bagi warga," tandas Sugeng.

Dirinya yakin upaya itu bisa mendorong warga dalam lebih giat memilih dan memilah sampah sejak dari rumah. Sehingga tidak semua barang bekas dibuang menjadi sampah melainkan dapat dikirimkan ke bank sampah. Upaya pemilahan sampah sejak dari rumah juga akan mempengaruhi volume sampah yang disetorkan ke TPA Piyungan. Namun hal itu pun harus dilakukan secara teratur dan disiplin.

Justru, imbuh Sugeng, fungsi lain bank sampah sebagai ajang edukasi di masyarakat bisa menjadi solusi dalam mengantisipasi berbagai masalah yang muncul dalam proses pembuangan sampah ke TPA Piyungan. Terutama ketika sewaktu-waktu terjadi penundaan pengangkutan akibat adanya keluhan warga di sekitar TPA Piyungan. (Dhi)-d

Bank BPD DIY Tambah ATM Capem Dlingo



Bank BPD DIY Cabang Pembantu Dlingo, dilengkapi dengan mesin ATM, Senin (5/10). (KR-Istimewa)

YOGYA (KR) - Sebagai bentuk komitmen meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan nasabah, Bank BPD DIY melengkapi Anjungan Tunai Mandiri (ATM) untuk kantor Cabang Pembantu (Capem) Dlingo, Pancuran Terong Dlingo Bantul, Senin (5/10). Penambahan ATM tersebut bertu-

juan memudahkan masyarakat sekitar Dlingo mengakses layanan perbankan secara online 24 jam.

Pemimpin Cabang Bank BPD DIY Cabang Bantul, Arief Budiman mengatakan, bagi nasabah tabungan Simpeda dan Sutera dapat memiliki fasilitas kartu ATM Bank BPD DIY secara gratis.

Saat ini, ATM Bank BPD DIY telah bergabung dengan jaringan ATM BERSAMA, PRIMA dan MEPS (Malaysian Electronic Payment System). "Dengan penambahan mesin ATM di Capem Dlingo, merupakan salah satu usaha Bank BPD DIY untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan nasabah," urai Arief Budiman.

Menurut Arief, seiring dengan perkembangan Kawasan Dlingo dan sekitarnya menjadi daerah tujuan wisata, Bank BPD DIY hadir untuk memberikan fasilitas layanan baik untuk wisatawan maupun masyarakat. Arief mengatakan, nasabah yang mempunyai kartu ATM Bank BPD DIY dapat melakukan aktivasi mobile banking. (Aha)-d

HUT Ke-264 Kota Yogya, JNE Gratis Ongkir

YOGYA (KR) - Dalam rangka HUT ke-264 Kota Yogyakarta, JNE memberikan gratis ongkos kirim (ongkir) untuk layanan reguler paket kiriman dengan tujuan dan dari dalam Kota Yogyakarta. Promo ini berlaku untuk paket dengan maksimum berat 2 kg di semua sales counter dan kantor perwakilan JNE yang berada di bawah cabang utama JNE Yogyakarta.

Pimpinan Cabang JNE Yogyakarta Adi Subagyo mengatakan, kebutuhan pengiriman paket meningkat karena masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah selama pandemi Covid-19. Program dari JNE Yogyakarta kali ini dilaksanakan untuk mempermudah masyarakat dalam mengirimkan paket untuk memenuhi berbagai kebutuhan.

"Program free ongkir ini selain mempermudah aktivitas belanja online masyarakat, juga untuk memicu pertumbuhan e-commerce, sehingga diharapkan dapat mendorong penjualan pelaku UKM," kata Adi di Yogyakarta, Senin (5/10).

Dikatakan, perayaan HUT ke-264 Kota Yogyakarta ini menjadi momentum tepat bagi JNE dalam mendukung berbagai upa-

ya melawan Covid-19, baik dari segi kesehatan maupun ekonomi masyarakat. "Khususnya para UKM pelaku e-commerce, promo ini kami harapkan bisa bermanfaat. Dengan adanya promo ini, baik seller maupun buyer mendapatkan keuntungan karena tidak dibebani ongkos kirim. Semoga dapat memicu pertumbuhan e-commerce dengan peningkatan aktivitas jual-beli online masyarakat di tengah pandemi," jelasnya.

Adi menuturkan JNE Yogyakarta juga mengadakan kuis berhadiah yang dapat diikuti warganet melalui akun instagram @JNE.Yogyakarta, 7 hingga 10 Oktober 2020. Untuk pelanggan setia JNE Yogyakarta, penerapan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah terus dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman ketika mengirimkan paket di tengah pandemi.

Penyempotan cairan disinfektan di sales counter dan area kerja serta ruangan publik lainnya dilakukan secara rutin. Seluruh petugas penerimaan barang juga telah dilengkapi dengan alat pelindung diri," pungkasi Adi. (Ira)-d

SELAIN DISIPLIN TERAPKAN '3M'

Keterlibatan Warga Tentukan Pengendalian Covid-19

YOGYA (KR) - Kebijakan *micro lockdown* di Kota Yogya, tercatat pernah dilakukan terhadap dua kampung. Keterlibatan warga dalam selama kebijakan itu pun turut menentukan pengendalian kasus Covid-19. Setidaknya tidak menimbulkan penularan hingga keluar kampung.

Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Yogya Heroe Poerwadi menyebut, keberhasilan dalam menangani virus Korona bahkan berkat keterlibatan masyarakat. "Kunci utama itu ialah keterlibatan masyarakat, sejak pencegahan sampai penanganannya," tandasnya, Senin (5/10).

Keterlibatan masyarakat di Kota Yogya sudah dilakukan sejak awal pandemi. Antara lain dengan membuat tempat cuci tangan untuk umum, penyempotan disinfektan, *lockdown* kampung, aksi berbagi sesama, relawan mengajar dan lain sebagainya. Bahkan warga pun ikut melakukan pemantauan terhadap kedatangan orang di kampung hingga membantu proses pelacakan kontak erat un-

tuk kebutuhan *tracing*.

Oleh karena itu, di samping ke-disiplinan dalam menerapkan '3M' atau memakai masker mencuci tangan, dan menjaga jarak, keterlibatan warga itu menjadi penentu keberhasilan pengendalian Covid-19. "*Micro lockdown* yang dilakukan level kampung itu sepenuhnya bahkan mengandalkan keterlibatan warga. Tidak ada paksaan untuk *lockdown*, namun masyarakat sendiri yang menghendaki supaya kasus di wilayahnya bisa terkendali," imbuh Heroe.

Lockdown terbatas di tingkat kampung itu seperti di wilayah Pandeyan dan Kotabaru. Terutama kampung yang kasus konfirmasi positifnya di atas 10 orang. Misalnya di Pandeyan, warga lantas membuat posko dalam penanganan kasus klaster Soto Lamongan. Kemudian di Kotabaru membatasi keluar masuk rumah selama 10 hari setelah ada temuan potensi penyebaran. "Semuanya itu akhirnya bisa menyelesaikan kasusnya di kampung tersebut dan tidak menjadikan penyebarannya meluas keluar kam-

pong," jelasnya.

Dengan demikian, keterlibatan masyarakat dalam mengatasi masalah menjadi penting. Hal ini karena masyarakat memiliki *local wisdom* yang otentik dan sehari-hari sudah dijalankan. Sehingga tidak asing, jelas Heroe ketika masyarakat sendiri yang bergerak dan bertindak dengan caranya masing-masing.

Sementara peran pemerintah lebih pada ikut mendukung, memberikan bantuan, membantu kelengkapan, menyiapkan kebijakan dan sebagainya. Akan tetapi, Heroe meyakini bantuan dari masyarakat jauh lebih banyak serta tidak terhitung jumlahnya. Pasalnya, ketika pemerintah masih disibukkan dengan verifikasi data untuk jaring pengaman sosial, gerakan saling bantu di masyarakat sudah bergulir cukup deras.

"Masyarakat di sini yang dimaksud ialah di samping warga juga komunitas, kampus dan korporat. Bahu-membahu bergandengan dan bergendongan menyelesaikan masalah Covid-19," tandas Heroe. (Dhi)-d

DPRD KOTA YOGYAKARTA SUARA WAKIL RAKYAT

JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP. (0274) 540650

MENUJU TATANAN PERKOTAAN MODERN

Sistem 'Ducting' Harus Terintegrasi

YOGYA (KR) - Pemkot Yogyakarta dinilai harus mulai menyiapkan sistem *ducting* yang terintegrasi. Jaringan yang terletak di dalam tanah tersebut sudah menjadi kebutuhan dalam penyediaan sarana dan prasarana masyarakat. Hal ini merupakan bagian dari upaya menuju tatanan perkotaan yang modern.

Ketua DPRD Kota Yogyakarta H Danang Rudiymoko, mengungkapkan penyediaan sarana dan prasarana masyarakat itu meliputi kebutuhan energi, listrik, gas, sambungan telepon, hingga sambungan air minum. "Sarana prasarana itu harus terintegrasi di dalam tanah melalui sistem *ducting*," ungkapnya.

Menurutnya, usia Kota Yogyakarta yang besok genap 264 tahun sudah selayaknya menjadi kota yang berperadaban modern. Salah satu cirinya ialah terjaganya estetika kota. Apalagi Yogya layak menjadi kota warisan dunia dengan banyaknya bangunan serta monumen heritage atau cagar budaya. Sehingga diharapkan tidak ada lagi infrastruktur yang menghalangi pemandangan.

Selain tidak adanya gangguan pandangan, ciri tata perkotaan yang maju ialah kenyamanan warga dalam menikmati ruang publik. Baik



H Danang Rudiymoko (KR-Ardhi Wahdan)

aktivitas lalu lintas yang nyaman serta pejalan kaki yang merasa aman. "Supaya ruang publik itu dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh warga kota serta siapa pun yang berkunjung ke kota ini. Ukuran modern bukan terletak pada kemegahan, tetapi bagaimana hak-hak publik terfasilitasi dengan baik," tandasnya.

Oleh karena itu, Danang berharap revitalisasi landmark Tugu yang memindahkan kabel melintang ke dalam sistem *ducting* bawah tanah, dapat dilanjutkan untuk setiap jalan-jalan protokol yang ada di

seluruh kota. Upaya itu bisa dilakukan dengan membuat peta sistem *ducting* secara menyeluruh. Peta itu bahkan bisa disinergikan dengan pembangunan saluran air hujan (SAH). Dengan begitu setiap revitalisasi SAH sekaligus difungsikan sebagai sarana *ducting* dengan dibuat seaman mungkin berupa bahan-bahan isolator sehingga tidak membahayakan.

Sedangkan realisasinya bisa dibuat pentahapan. Tahap awal menasar kawasan cagar budaya dengan memanfaatkan alokasi dana keistimewaan (danais). Kemudian dikembangkan kawasan lain dengan mengakses dana alokasi khusus (DAK) dari pusat agar beban APBD tidak semakin berat. "Penataan seperti ini harus segera dimulai. Kami di dewan siap mendukung karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak," urainya.

Di samping itu, hal yang tidak kalah penting ialah jalinan kerja sama pembangunan antara Pemkot Yogyakarta dengan Pemda DIY dalam menata kota. Terlebih sudah dilakukan revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang semakin integratif. Sehingga jika harus dilakukan pembongkaran jalan, tidak lagi terkendala dengan status jalan provinsi atau nasional. (Dhi)-d